Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal Antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Yang Berakibat Wanprestasi

Oleh : Citra Rahmawati Lubis

Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H.,M.H.

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn.

Alamat: Pandau Permai, Jalan. Sirsak III Blok C13 No. 24

Email: citraciraa@gmail.com – Telepon: 081266535000

ABSTRACT

Agreement on cooperation made between PD. Dumai Bersemai Port (BUMD) with PT. Tiga Bersaudara Port has fulfilled the legal requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. But over time, this agreement has become null and void, because the second party is PD. Dumai Bersemai Port canceled the agreement, and unilaterally decided the agreement, this happened because PT. Tiga Bersaudara Port on the implementation of the practice of cooperation agreements between PD. Dumai Bersemai Port is seeded with PT. Tiga Bersaudara Port did not side with PT. Dumai Bersemai Port as the second party in this agreement, and PT. Tiga Bersaudara Port has defaulted by not paying a profit sharing fund of 7.5% to PD. Dumai Bersemai Port.

The author sets the main problem as follows about whether the factors causing the default between PD. Dumai Bersemai Port (BUMD) with PT. The Tiga Bersaudara Port and what are the legal consequences of not implementing a cooperation agreement between PD. Dumai Bersemai Port (BUMD) with PT. Tiga Bersaudara Port.

This writing when viewed from the type of research is classified as sociological legal research and can also be said as a field research that is reviewing the applicable legal provisions and what happens in reality in the community or in other words a study conducted on actual reality or real conditions occur in the community with the intention to find out and find the facts and data needed collected then go to the identification of problems which ultimately lead to problem solving. Whereas if viewed from its nature, this writing is descriptive analysis, which means that the research intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research problems.

From the results of research Factors that cause the occurrence of default between PD. Dumai Bersemai Port (BUMD) with PT. Tiga Bersaudara Port because PT. Tiga Bersaudara Port does not share a sharing fund of 7.5% of each revenue from ship scouting services carried out by PT. Tiga Bersaudara Port, so that PD. Dumai Bersemai Port carries out unilateral termination of the Cooperative Service Cooperation Agreement on Ship Guiding Services Operations while the legal consequences of not implementing cooperation agreements between PD. Dumai Bersemai Port (BUMD) with PT. Tiga Bersaudara Port that there had been a unilateral termination of the contract by the Administrative Services Cooperation Agreement of the Ship Guiding Service in the Special Terminal of PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang and PT. Pacific Indopalm in Class 1 Dumai Compulsory Waters, the parties agreed to remind themselves of a special bond contained in an agreement.

Keywords: Agreement - Ship Guiding Services - PD. Dumai Bersemai Port (BUMD) - PT. Tiga Bersaudara Port - Default

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia tidak ada yang sempurna, karenanya manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Apalagi sebagai seorang wirausaha dalam kegiatan usaha memerlukan kerjasama usaha dengan pihak lain, dan dalam memilih mitra kerjasama tentu memilih mitra yang memiliki kelebihan atas kekurangan yang dimiliki diri sendiri, serta memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun mitra kerjasama. Dengan demikian, kerjasama tidak didorong oleh kepentingan sepihak saja, melainkan harus dilandasi oleh kesepakatan yang membawa kemaslahatan kedua pihak.

Sehubungan dengan pengertian Hukum Kontrak dalam literature ilmu hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan disamping istilah “Hukum Perikatan” untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah “Hukum Perutangan”, “Hukum Perjanjian” ataupun “Hukum Kontrak”. Masing-masing istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan lainnya.¹

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomstrecht*. Lebih lengkap lagi Salim, H.S. mengartikan hukum kontrak sebagai “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Defenisi tersebut didasarkan kepada pendapat Van Dunne, yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya yang mencakup tahap *precontractual* dan *post contractual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian.²

Perjanjian kerjasama dalam praktek dewasa ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia, tidak terkecuali yang dilakukan oleh PD. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara.

Salah satu tujuan perjanjian kerja sama yang banyak dilakukan oleh Badan Usaha adalah dalam rangka untuk mengembangkan usahanya dan tentu saja tujuan utama adalah memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut, disamping itu juga dengan adanya kerja sama tersebut maka diharapkan dapat mendukung kegiatan Badan Usaha tersebut untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak lain. Kenapa demikian karena dengan adanya perjanjian kerja sama memberikan jalan keluar apabila para pihak menghadapi berbagai kegiatan perusahaan dapat terselesaikan dengan maksimal.

Begitu pula halnya perjanjian yang dibuat antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, sebagai salah satu upaya bisnis yang menimbulkan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam nomor kontrak SPK/PTB-JKT/PDB/003/V/2013 dan Nomor 001/PDB-PTB/SPK/V/2013, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dalam hal melaksanakan jasa pemanduan kapal di Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai sesuai dengan Keputusan Menteri No. KP. 1161 Tentang Pemberian Izin Kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara untuk menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Terminal Khusus PT. Sari Dumai, PT. Semen Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai pada tanggal 20 Desember 2012.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut dan mengenai pembatalan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1446 KUHPerdara bahwa pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dapat

¹ Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. cetakan ke-2. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2006. Hlm. 1

² Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. Hlm. 3

dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif yang tercantum pada syarat sah perjanjian. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam peristiwa ini adanya kerugian bagi kreditur terhadap debitur bila kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak debitur.³

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Untuk syarat subjektif dalam perjanjian yaitu: masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama itu sepakat dan cakap baik itu pihak PD. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) maupun pihak PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara. Untuk syarat objektif dalam perjanjian tersebut jelas yaitu penyelenggaraan administrasi operasional PPJ pemanduan, sedangkan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan perjanjian masalah administrasi pemanduan kapal.

Namun seiringnya waktu, perjanjian ini menjadi batal demi hukum, karena Pihak yang kedua yaitu PD. Pelabuhan Dumai Bersemai membatalkan perjanjian tersebut, dan memutuskan sepihak perjanjian tersebut, hal tersebut terjadi karena PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara pada pelaksanaan praktek perjanjian kerjasama antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, sama sekali tidak berpihak kepada PD. Pelabuhan Dumai Bersemai sebagai pihak kedua dalam perjanjian ini, dan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan dana bagi hasil sebesar 7,5% kepada PD. Pelabuhan Dumai Bersemai.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara bahwa tidak adanya kontribusi yang nyata dilakukan oleh PT. Pelabuhan Dumai Bersemai dengan tidak mengirimkan tenaga administratifnya kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara selama

perjanjian ini berlangsung (kurun waktu 15 bulan) sehingga dengan demikian PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara beranggapan bahwa PD. Pelabuhan Dumai Bersemai tidak pantas mendapatkan dana bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dalam perjanjian kerjasama Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai seperti yang tertera kontrak perjanjian Pasal 9. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa terhadap pelayanan jasa administrasi operasional yang diberikan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan pembagian pendapatan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari pendapatan kotor yang diperoleh Pihak Pertama dari jasa Pemanduan setelah dikurangi PNPB dan pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis sangat perlu dicermati lebih lanjut mengenai perjanjian antara kedua belah pihak, yang sama-sama tidak melakukan perjanjian yang telah disepakati, sah dan mengikat diantara kedua belah pihak baik hak dan kewajibannya sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), sehingga perjanjian tersebut dibatalkan oleh PD. Pelabuhan Dumai Bersemai. Karena perjanjian tersebut sama sekali tidak menguntungkan pihak PD. Pelabuhan Dumai Bersemai. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menjadi tertarik untuk menelitinya karena telah terjadinya pembatalan sepihak oleh PD. Pelabuhan Dumai Bersemai terhadap perjanjian Jasa Pemanduan Kapal yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal Antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) Dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Yang Berakibat Wanprestasi”**.

³ Revenue Agent David Garrett. “*Non Docketed Service Advice Review*” Artikel Pada Jurnal WestLaw. District Counsel, Georgia District, Atlanta. June 30, 1999.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum dari tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis
 - 1) Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - 2) Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum perdata. Terutama untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pelayanan administrasi operasional jasa pemanduan kapal antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara.
- b) Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi pelayanan administrasi operasional jasa pemanduan kapal, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dalam menjalankan kerjasama dalam proses perjanjian kerjasama pelayanan administrasi operasional jasa pemanduan kapal dengan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai.

- 2) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pelayanan administrasi operasional jasa pemanduan kapal di PD. Pelabuhan Dumai Bersemai.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Menurut hukum perdata Indonesia, secara umum perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUH Perdata). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan.⁴

Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵ Peran hukum perjanjian itu juga dalam pengaturan ini adalah untuk menafsirkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian melalui lisan dan tulisan. Oleh karena itu, perjanjian itu dengan mudah akan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.⁶

Suatu perjanjian dalam arti luas berarti, bahwa setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Menurut Yahya Harahap suatu perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum kekayaan atau hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh

⁴ Novina Sri Indiraharti. "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)". Artikel Pada Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 1 Tahun 2014. Hlm 18

⁵ R. Subekti dan Tjitrosudjo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. 2001. Hlm. 33

⁶ David E. Pierce. "Easement Scope, Intensity, and Change". Artikel Pada Jurnal WestLaw Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School of Law, Topeka, Kansas. 2012.

suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁷

Sedangkan menurut doktrin (teori lama) yang disebut dengan perjanjian adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Defenisi tersebut telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian adalah.

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan;
- d. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih;
- e. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- f. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.⁸

Sedangkan para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, tetai mencakup sampai kepada lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, namun memiliki sifat yang berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III kriterianya dinilai secara materil atau uang.⁹

Walaupun dikatakan bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:¹⁰

1. Syarat subyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan yang meliputi:
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan
2. Syarat obyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum yang meliputi:
 - a. Suatu hal (obyek) tertentu
 - b. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan syarat sahnya perjanjian yang khusus adalah:

1. Syarat tertulis untuk perjanjian tertentu;
2. Syarat akta notaris untuk perjanjian tertentu;
3. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk perjanjian tertentu;
4. Syarat izin dari yang berwenang.¹¹

Di dalam hukum kontrak dikenal banyak asas, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik.¹² Namun dalam penelitian ini, asas yang digunakan dalam penelitian adalah asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik:

1. Asas Pacta Sunt Servanda;
Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Asas Iktikad baik.
Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus

⁷ M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung. 1992. Hlm. 25

⁸ Salim HS. *Op.Cit.* Hlm. 25

⁹ Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2001. Hlm. 65

¹⁰ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013. Hlm. 1

¹¹ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Eropa Global*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. Hlm. 24

¹² Ahmadi Miru. *Op.cit.* hlm. 3

dilaksanakan dengan iktikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan dibawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak, disamping itu persetujuan harus pula memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Essentialia, yaitu bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa bagian ini persetujuan tersebut tidak mungkin ada.
2. Naturalia, yaitu bagian-bagian yang oleh Undang-Undang harus ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
3. Accidentalialia, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan didalam persetujuan yang mana Undang-Undang tidak mengaturnya.¹³

Pengertian perjanjian atau kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal khusus.¹⁴ Dari defenisi yang dikemukakan diatas, secara jelas terdapat suatu kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju untuk melaksanakan suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan dan sebagainya).¹⁵ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak terpenuhi oleh salah satu pihak tersebut. Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁷ Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.

¹⁵ Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Apollo. Surabaya. 1997. Hlm. 576

¹⁶ Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. 2005

¹⁷ Khairunnisa. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Pasca Sarjana. Medan. 2008. Hlm. 4

¹³ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit*. Hlm. 15

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo. *Panduan Merancang Kontrak*. PT.Grasindo. Jakarta. 2001. Hlm. 6

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerduta yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerduta yaitu:
 - 1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
 - 2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
 - 3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang

kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

- 4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- 5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerduta melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

- 1) Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah

¹⁸ Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1999. Hlm. 53

¹⁹ Widiyono. *Wewenang Dan Tanggung Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004. Hlm. 27

ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan.²⁰

- 2) Wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Ada 4 jenis-jenis wanprestasi diantaranya:
 - a) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
 - b) Melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
 - c) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat
 - d) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan²¹
- 3) Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.²²
- 4) Perjanjian kerjasama adalah Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- 5) Administrasi operasional jasa pemanduan kapal adalah kerjasama dalam bidang administrasi khususnya penerimaan dan permintaan PPJ. Untuk pelayanan jasa pemanduan di Terminal khusus, PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang, dan PT. Pacific Indopalm antara PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai dengan Bendera PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *hukum sosiologis* dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.²³

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori atau menyusun teori-teori baru.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pelabuhan Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia dengan alasan data yang diperlukan dalam penulisan ini akan lebih mudah didapat sehingga mendukung penelitian penulis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan yang mempunyai karakteristik yang sama.²⁵ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.²⁶ Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Direktur PT. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) sebanyak 1 orang
- b. Direktur PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara sebanyak 1 orang

²³ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika. 2002. Hlm. 15

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010. Hlm. 10

²⁵ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2005. Hlm. 118

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Liberty. Yogyakarta. 2000. Hlm. 22

²⁰ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2010. Hlm. 12

²¹ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c. Pihak Kejaksaan Negeri Kota Dumai sebanyak 1 orang

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Data tersebut berkaitan dengan analisis hukum pelaksanaan perjanjian kerjasama pelayanan administrasi operasional jasa pemanduan kapal antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara yang berakibat wanprestasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari kajian perpustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya data tersebut terdiri dari:

Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) sesuai dengan permasalahan, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal Di Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang, dan PT. Pacific IndoPalm, Di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai Antara PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Dengan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai Nomor: SPK/PTB-JKT/PDB/003/V/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku yang berhubungan dengan judul penelitian, jurnal, majalah hukum, skripsi, tesis dan internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai alat bantu untuk mewawancarai dengan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada Kepala Cabang PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Cabang Dumai dan Direktur Utama PD. Pelabuhan Dumai Bersemai. Dalam hal ini pewawancara terikat pada daftar pertanyaan yang dibuat agar mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.²⁷

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini)

²⁷ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²⁸

II. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana apabila seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu ataupun tidak untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, perjanjian merupakan suatu peristiwa konkret yang dapat diamati.

Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun unsur-unsur perjanjian menurut teori perjanjian adalah adanya perbuatan hukum, penyesuaian kehendak dari beberapa orang, persesuaian kehendak harus dinyatakan, perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain, kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbul balik, dan persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.²⁹

Seperti yang telah penulis uraikan pada latar belakang, bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara adalah perjanjian pelayanan administrasi operasional jasa pemanduan kapal di Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai yang dibuat oleh para pihak untuk disepakati

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara adalah perjanjian tentang jasa pemanduan kapal di Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati. Adapun perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam nomor kontrak SPK/PTB-JKT/PDB/003/V/2013 dan Nomor 001/PDB-PTB/SPK/V/2013. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang faktor penyebab PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini, dari hasil wawancara penulis diketahui bahwa pihak PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara tidak memberikan kompensasi keuntungan sebesar 7,5% kepada PD. Pelabuhan Dumai Berseri dalam operasional pemanduan kapal ini.³⁰

Menurut penulis bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal ini semulanya berjalan dengan baik, namun hubungan antara para pihak mulai tidak berjalan dengan baik, karena Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya diantaranya:

1. Pihak Pertama dalam hal ini sejak pertama dilaksanakan perjanjian sama sekali tidak memberikan pembagian keuntungan sebesar 7,5% dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak
2. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan PT. Pelabuhan Dumai Berseri harusnya sama-sama memiliki modal yang seimbang sehingga memberikan keuntungan kedua belah pihak
3. Sarana dan prasarana pemanduan termasuk administrasi pemanduan dilakukan sendiri oleh pihak PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara sehingga PT. Pelabuhan Dumai Berseri tidak melakukan kegiatan apapun dalam pengoperasian pemanduan
4. Kewajiban PT. Pelabuhan Dumai Berseri sebagaimana yang dituangkan didalam perjanjian Pasal 6 dalam hal ini menyiapkan tenaga administrasi operasional tidak

²⁸ *Op.Cit.* hlm. 45.

²⁹ Putu Prasmita Sari dan I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise". Kertha Semaya. Vol.04, No.05. Oktober. 2016. Hlm. 1

³⁰ Wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Hasbi, selaku Humas PT. Pelabuhan Dumai Berseri, 16 November 2018

dilaksanakan oleh pihak PT. Pelabuhan Dumai Berseri, sehingga PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara juga tidak melaksanakan kewajibannya.

Melihat hubungan yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pihak pertama dan pihak kedua sama-sama melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini, sehingga perjanjian ini haruslah diakhiri karena tidak apabila diteruskan akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Penulis juga menanyakan kepada Kepala Cabang PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara tentang apakah penyebab dari berakhirnya perjanjian administrasi operasional jasa pemanduan kapal ini, dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa kerjasama antara PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan PT. Pelabuhan Dumai Berseri mengenai kepemilikan sarana dan prasarana pemanduan, pengoperasian pemanduan, termasuk administrasi pemanduan, seluruhnya dilakukan oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, namun PT. Pelabuhan Dumai Berseri sama sekali tidak melakukan kegiatan apapun dalam pengoperasian pemanduan kapal di Lubuk Gaung Dumai.³¹

Penulis juga menanyakan kepada Kepala Cabang PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara tentang apakah pemutusan perjanjian ini dilakukan sepihak oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya tidak berniat melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan PT. Pelabuhan Dumai Berseri, namun pihak PT. Pelabuhan Dumai Berserilah yang melakukan pemutusan hubungan kerjasama ini terlebih dahulu, dengan meminta *legal opinion* (pendapat hukum) dari penegak hukum yang ada di Kota Dumai, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Dumai, karena sejak awalnya Kejaksaan Negeri Dumai telah mengatakan bahwa kegiatan administrasi operasional jasa pemanduan kapal ini oleh PT. Pelabuhan Dumai Berseri tidak sah secara hukum karena tidak memiliki izin.³²

Menanggapi hal tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan pihak PT. Pelabuhan Dumai Berseri, tentang apakah pihaknya memang betul tidak melakukan

kewajiban pelayanan administrasi operasional jasa pemanduan kapal, seperti yang diutarakan oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa dari awal PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara sudah mengetahui akan hal tersebut, dan hal itu tidak menjadi masalah, namun setelah perjanjian tersebut berjalan, pihak PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara mencari alasan supaya sharing 7,5% tersebut tidak dibayarkan kepada PT. Pelabuhan Dumai Berseri.³³

Pihak PT. Pelabuhan Dumai Berseri juga menyatakan, bahwa pihak dari PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dari awal sudah mengetahui bahwa pihak PT. Pelabuhan Dumai Berseri sama sekali tidak memiliki aset (sarana dan prasarana) yang memadai dalam melaksanakan administrasi operasional jasa pemanduan kapal di Terminal Khusus Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai, karena diawal perundingan dalam pembuatan draft perjanjian kontrak kerjasama antara PT. Pelabuhan Tiga bersaudara dengan PT. Pelabuhan Dumai Berseri sudah diketahui bersama bahwa PT. Pelabuhan Dumai Berseri sejak tahun 2005 sampai dengan 31 Januari 2013 merupakan sarana dan prasarana milik PT. Pelayaran Kebun Asrinusa (PT. PKA) yang telah bekerja sama dengan PT. Pelabuhan Dumai Berseri sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, sebelum pelimpahan kewenangan izin pemanduan diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara sehingga PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara yang merupakan 1 grup perusahaan dengan PT. PKA sudah mengetahui secara jelas mengenai keberadaan dari PT. Pelabuhan Dumai Berseri.³⁴

Dalam melakukan pemanduan kapal PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara memperoleh keuntungan atas pelayanan jasa pemanduan kapal diterminal khusus PT. Semen Padang dan terminal khusus PT. Semen Padang dan terminal khusus PT. Pacifik Indopalm yang secara keseluruhan berada didalam wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai. Pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebesar 7,5% akan diperoleh Pihak Pertama dari Jasa Pemanduan Kapal yang dilakukan oleh Pihak Kedua setelah

³¹ Hasil wawancara penulis dengan Humas PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Bapak Yose Purba, pada tanggal 19 November 2018

³² Hasil wawancara penulis dengan Humas PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Bapak Yose Purba, pada tanggal 19 November 2018

³³ Hasil wawancara penulis dengan Humas PT. Pelabuhan Dumai Berseri Bapak. Ir. Muhammad Hasbi, pada tanggal 16 November 2018

³⁴ Hasil wawancara penulis dengan Humas PT. Pelabuhan Dumai Berseri Bapak. Ir. Muhammad Hasbi, pada tanggal 16 November 2018

dipotong Pajak. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara.

B. Akibat Hukum dari Tidak Dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara

Pembatalan perjanjian akan menyebabkan keadaan kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian dilakukan. Jika salah satu pihak telah lalai dalam melaksanakan perjanjian. Wanprestasi berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Untuk mencegah wanprestasi dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak, hukum menyediakan sanksi yakni merupakan sanksi perdata karena masalah kontrak menyangkut kepentingan pribadi, yang berbeda dengan sanksi pidana berupa hukuman fisik terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak PT. Pelabuhan Dumai Berseri tentang apakah dengan tidak adanya pembagian keuntungan dalam perjanjian ini, maka perusahaan PT. Pelabuhan Dumai Berseri merasa dirugikan dalam menjalin kesepakatan perjanjian kerjasama ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihak PT. Pelabuhan Dumai Berseri jelas sangat dirugikan dalam hal ini, karena ketidakjelasan dari pihak PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dalam pembayaran profit sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja. Namun pihak PT. Pelabuhan Dumai Berseri akan membahasnya lebih lanjut pada proses arbitrase.³⁵

Perihal wanprestasi harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memberikan peringatan atau somasi secara tertulis. Kecuali didalam perjanjian ditentukan secara tegas dan kapan para pihak dianggap lalai.³⁶ Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian telah memenuhi syarat batal apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian timbal balik. Syarat batal itu terjadi bila

³⁵ Hasil wawancara penulis dengan Humas PT. Pelabuhan Dumai Berseri Bapak Ir. Muhammad Hasbi, pada tanggal 16 November 2018

³⁶ Djohari Santoso dan Achmad Ali. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 1989. Hlm 57-58

wanprestasi bukan karena keadaan memaksa atau diluar kekuasaan tetapi karena adanya kelalaian. Wanprestasi harus didasari dengan adanya suatu perjanjian sehingga kewajiban yang tidak dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan telah memenuhi syarat batal dan dapat dimohonkan wanprestasi.³⁷ Permohonan itu bisa berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi ataupun pembatalan perjanjian.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal di Terminal Khusus Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai yang diadakan oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan PT. Pelabuhan Dumai Berseri bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan ganti rugi. Namun wujud dari ganti rugi dalam Perjanjian Kerjasama Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal di Terminal Khusus Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Para pihak sepakat dapat dibebaskan tanggung jawab atas kegagalan masing-masing dalam melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya apabila hal tersebut disebabkan Force Majeure
- b. Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang mengalami Force Majeure akan memberitahukan dengan bukti kepada Pihak lain selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak terjadinya Force Majeure

Terjadi pemutusan surat perjanjian secara sepihak sebagaimana yang telah diatur dalam pemutusan perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal di Terminal Khusus Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak PT. Pelabuhan Dumai Berseri tentang tanggung jawab PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara tentang tanggung jawab PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara karena telah melakukan wanprestasi perjanjian pelayanan administrasi operasional jasa pemanduan kapal di Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT.

³⁷ Elly Erawati dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian Nasional*. Legal Reform Program. Gramedia. Jakarta. 2010. Hlm. 2627

³⁸ Pasal 12 Perjanjian Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal di Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai antara PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan PT. Pelabuhan Dumai Berseri

Semen Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima ganti rugi atas kompensasi dana sharing sebesar 7,5% sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak kerja antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara.³⁹

Penulis juga menanyakan hal tersebut kepada pihak PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara tentang adakah ganti rugi yang dituntut oleh pihak PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya sama sekali tidak melakukan wanprestasi karena pihak PT. Pelabuhan Dumai Berseri yang sebenarnya melakukan wanprestasi dan pemutusan secara sepihak dalam perjanjian ini. Pihak PT. Pelabuhan Dumai Berseri dari awal perjanjian sudah melakukan wanprestasi, karena sama sekali tidak melakukan seperti apa yang dicantumkan dalam surat perjanjian.⁴⁰

Suatu peristiwa hukum merupakan perbuatan manusia yang segala akibatnya diatur oleh hukum. Hukum diperlukan apabila ada satu pihak yang dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang mengadakan perjanjian itu, dan pihak yang dirugikan tersebut telah setuju agar persoalannya diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mereka perbuat atau prosedur hukum yang berlaku.

Kerugian/biaya yang harus ditanggung PT. Pelabuhan Dumai Berseri sebagai akibat pemutusan hubungan kerja diluar sepengetahuan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara. Dengan pemutusan kontrak sepihak yang hanya berjalan selama 20 bulan, sehingga menghilangkan keuntungan yang diharapkan PT. Pelabuhan Dumai Berseri.

Sejalan dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal di Terminal Khusus Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai tersebut pihak PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara bahwa apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya berdasarkan isi perjanjian kerjasama yang telah para pihak tanda tangani. Adapun bentuk

penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal di Terminal Khusus Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai yang diadakan oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan PT. Pelabuhan Dumai Berseri adalah setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara kedua belah pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari adanya perjanjian ini maka terlebih dahulu akan dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar, namun setelah lewat 30 hari musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan ini melalui Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) sebagai keputusan final dan mengikat para pihak.

Dengan demikian tampak jelas bahwa penyelesaian perselisihan yang terjadi, semuanya telah diatur cara penyelesaiannya dalam perjanjian kerjasama yang telah mereka sepakati dan ditandatangani bersama. Sehingga bila perselisihan tersebut benar terjadi, maka mereka akan menempuh jalan yang mereka sepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut baik itu dengan jalan musyawarah ataupun melalui proses pengadilan.

Suatu perjanjian kerjasama dapat dibatalkan jika terbukti mengandung kejadian *forje majeure* dalam proses pembentukan kesepakatan diantara para pihak. Dasar hukum pembatalan perjanjian tersebut adalah ketentuan Pasal 1328 BW dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perjanjian kerjasama, maka pembatalan terhadap perjanjian kerjasama atas wanprestasi oleh salah satu pihak. Pembatalan dalam hal ini yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata. Pertanggungjawaban harus dimintakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan melakukan suatu penuntutan melalui penyelesaian musyawarah antara kedua belah pihak akan dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemahaman mengenai pembatalan perjanjian seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, tidak dipenuhinya unsur subjektif, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak dipenuhinya unsur objektif, apabila terdapat

³⁹ Hasil wawancara penulis dengan Humas PT. Pelabuhan Dumai Berseri Bapak Ir. Muhammad Hasbi, pada tanggal 16 November 2018

⁴⁰ Hasil wawancara penulis dengan Humas PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Bapak Yose Purba, pada tanggal 19 November 2018

perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pemutusan perjanjian merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban para pihak. Peristiwa tersebut pada umumnya dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban salah satu pihak yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tersebut diputus. Sehingga dengan diputusnya secara sepihak perjanjian ini oleh PT. Pelabuhan Dumai Berseri, maka akan menghilangkan kewajiban pembayaran dana sharing sebesar 7,5% yang seharusnya dilakukan oleh pihak PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi antara PD. Pelabuhan Dumai Bersemai (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara yaitu PT. Pelabuhan Dumai Berseri terhadap PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara yang dinilai tidak melakukan pembagian dana sharing sebesar 7,5% dari setiap pendapatan jasa pemanduan kapal yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, sehingga PT. Pelabuhan Dumai Berseri melakukan pemutusan sepihak terhadap Perjanjian Kerjasama Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal.
2. Akibat-akibat hukum dari tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara bahwa telah terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh Perjanjian Kerjasama Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal di Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai, para pihak sepakat dalam mengingatkan diri dalam suatu ikatan khusus yang tertuang dalam suatu kontrak perjanjian.

B. Saran

1. Perlu adanya kekuatan hukum yang dapat mengikat perjanjian tersebut sehingga para pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama dapat terjamin pelaksanaannya.
2. Perlu adanya pengaturan terhadap kontrak yang jelas, apalagi mengenai wanprestasi, karena wanprestasi sebelumnya tidak diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Aslim Rasyad, 2005. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2001. *Panduan Merancang Kontrak*. PT.Grasindo. Jakarta.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali. 1989. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Djojodirdjo, Moegni. 1999. *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*. PT.Pradnya Paramita. Jakarta.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian Nasional*. Legal Reform Program. Gramedia. Jakarta.
- Gemala Dewi, et.al., 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Pasca Sarjana. Medan.
- Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 2000. *Metode Penelitian Survei*. Liberty. Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 1992. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.
- Munir Fuady. 2000. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Eropa Global*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Subekti dan Tjitrosudio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. 2001.
- Salim H.S. 2006. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ke-4. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Widiyono. 2004. *Wewenang Dan Tanggung Jawab*. Ghalia Indonesia. Bogor
- dan Korea Selatan)” .Artikel Pada Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 1 Tahun 2014
- Putu Prasmita Sari dan I Gusti Ngurah Parwata. “*Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise*”. Kertha Semaya. Vol.04, No.05. Oktober. 2016
- Revenue Agent David Garrett. “*Non Docketed Service Advice Review*” Artikel Pada Jurnal WestLaw. District Counsel, Georgia District, Atlanta. June 30, 1999.
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2010

C. Peraturan Per Undang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Administrasi Operasional Jasa Pemanduan Kapal Di Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang, dan PT. Pacific IndoPalm, Di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai Antara PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Dengan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai Nomor:SPK/PTB-JKT/PDB/003/V/2013

B. Jurnal / Kamus / Skripsi / Tesis

- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. 2005
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Apollo. Surabaya. 1997.
- David E. Pierce. “*Easement Scope, Intensity, and Change*”. Artikel Pada Jurnal WestLaw Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School of Law, Topeka, Kansas. 2012.
- Novina Sri Indiraharti. “*Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia*